

BAB 1

PENDAHULUAN

Tingkat kredibilitas laporan keuangan yang rendah menjadi penyebab terjadinya skandal akuntansi *high-profile* seperti Enron, Tyco dan Worldcom (Sagitaria & Mita, 2019). Oleh karena itu laporan keuangan harus diaudit oleh pihak eksternal untuk memberikan jaminan independen atas kredibilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan (DeFond dan Zhang, 2014). Meskipun laporan keuangan telah diaudit, masih terjadi banyaknya skandal laporan keuangan baik di Indonesia maupun di luar negeri yang menandakan rendahnya kualitas audit sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan ekonomi suatu perusahaan secara akurat (Juliana dan Widodo, 2019; DeFond dan Zhang, 2014). Beberapa kasus manipulasi laporan keuangan di Indonesia diantaranya adalah kasus PT Kereta Api Indonesia, PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Hanson Internasional Tbk, SNP Finance. Adanya tekanan untuk mampu bersaing dan menarik para investor, menjadikan manajemen berperilaku menyimpang dan memanipulasi laporan keuangan (Bédard & Gendron, 2010). Manipulasi laporan keuangan ini telah mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi para pemangku kepentingan. Dari beberapa skandal laporan keuangan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas tata kelola perusahaan (Sylvia Veronica Siregar, 2018). Peran komite audit sebagai mekanisme tata kelola perusahaan mendapat banyak perhatian yang cukup besar setelah terjadinya beberapa skandal laporan keuangan tersebut (Zalata et al., 2018).

Dalam penelitian ini, kualitas audit dihubungkan dengan komite audit. Tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk mengawasi proses pelaporan keuangan, proses audit dan internal kontrol suatu perusahaan (Agrawal & Chadha, 2005). Komite audit dengan struktur yang tepat memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan independensi audit sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Ghafran & O'Sullivan, 2013). Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) salah satu peran dan tanggung jawab komite audit adalah melaksanakan pengawasan atas proses

pelaporan keuangan sesuai dengan standar dan memastikan proses audit laporan keuangan oleh auditor eksternal sesuai dengan mutu. *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) juga mengeluarkan *Auditing Standard* 16 (AS 16) untuk meningkatkan komunikasi antara auditor eksternal dan komite audit, mengingat pentingnya peran komite audit dalam proses audit.

Maraknya kasus manipulasi laporan keuangan juga membuat regulator terus memperbarui peraturan tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Untuk meningkatkan efektivitas komite audit, beberapa negara mensyaratkan agar anggota komite audit memiliki keahlian keuangan. Di beberapa negara seperti United Kingdom dan United State of America (USA) yang tertuang dalam UK Corporate Governance Code 2018: 24 dan Sarbanes-Oxley section 407 dimana peraturan tersebut menyebutkan bahwa minimal dari anggota komite audit terdapat satu anggota yang memiliki keahlian keuangan. Di Indonesia terdapat peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyebutkan salah satu persyaratan komite audit adalah wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Keahlian keuangan komite audit berarti komite audit memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pelaporan keuangan sehingga dapat memberikan penilaian dan evaluasi mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan untuk melindungi pemegang saham dan melakukan fungsi pengawasan (Defond et al., 2005).

Latar belakang keahlian keuangan telah menjadi syarat wajib dalam proporsi anggota komite audit. Adanya aturan tersebut mengharuskan keahlian keuangan komite audit mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaporan keuangan (Agrawal & Chadha, 2005) sehingga keahlian keuangan komite audit memungkinkan untuk mengurangi manajemen laba dan meningkatkan analisis keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zalata et al., (2018) menemukan bahwa keahlian keuangan komite audit dapat mengurangi manajemen laba. Krishnan dan Visvanathan (2009) juga menemukan hasil bahwa keahlian keuangan dari anggota komite audit meningkatkan efektivitas komite audit.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh antara keahlian keuangan komite audit dan kualitas audit masih terbatas. Sebagian besar penelitian tersebut meneliti bagaimana efektivitas keahlian keuangan anggota komite audit tanpa mempertimbangkan peran ketua komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas keseluruhan fungsi komite sehingga ketua komite audit memiliki tanggungjawab paling besar diantara anggota komite audit lainnya (Chaudhry et al., 2020). Ketua komite audit bertanggung jawab dalam menetapkan dan mengawasi agenda rapat serta memastikan aliran informasi yang tepat antara komite audit dengan pihak lain seperti manajemen dan auditor eksternal (Bédard & Gendron, 2010). Oleh karena itu, ketua komite audit memiliki tanggung jawab paling besar dalam mengawasi prosedur penyusunan laporan keuangan dan bertanggung jawab atas potensi kegagalan pelaporan keuangan daripada anggota komite audit lainnya (Schmidt and Wilkins, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Baatwah et al., (2019) menunjukkan hubungan negatif signifikan antara ketua komite audit berlatar belakang keahlian keuangan dengan *audit delay*. Sementara itu Chaudhry et al., (2020) menemukan hasil bahwa ketua komite audit berlatar belakang keahlian keuangan secara signifikan berkorelasi positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Namun, penelitian empiris tentang peran ketua komite audit dalam meningkatkan efektivitas komite audit masih terbatas (Bédard & Gendron, 2010; Carcello et al., 2011).

Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap kualitas audit dengan menggunakan proporsi anggota komite audit dan juga meneliti bagaimana ketua komite audit berlatar belakang keahlian keuangan memoderasi pengaruh tersebut. Penelitian ini menggunakan 1370 sampel dari seluruh perusahaan terdaftar di BEI tahun 2016 - 2019 dengan mengecualikan perusahaan keuangan. Tahun 2016 dipilih dengan pertimbangan terbitnya peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 dan tidak menyertakan tahun 2020 dikarenakan terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada laporan keuangan (Golubeva, 2021 dan Albitar et al., 2021). Kualitas audit diukur dengan menggunakan akrual diskresioner karena merupakan

proxy kualitas audit berbasis output yang mengukur kualitas pelaporan keuangan (DeFond & Zhang, 2014).

Dengan analisis regresi linear berganda menggunakan software STATA 14.0 diperoleh hasil bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan semakin tinggi proporsi anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan maka akan meningkatkan kualitas audit. Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa ketua komite audit berlatar belakang keahlian keuangan tidak memperkuat pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap kualitas audit. Sehingga tidak memperoleh bukti empiris mengenai ketua komite audit berlatar belakang keahlian keuangan dalam meningkatkan efektivitas fungsi komite audit dalam meningkatkan kualitas audit. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap kualitas audit dan dapat menjadi pertimbangan bagi *policy maker* dan perusahaan dalam menentukan anggota komite audit. Susunan anggota komite audit yang tepat dapat meningkatkan kualitas audit sehingga kredibilitas laporan keuangan juga semakin akurat dalam mencerminkan kondisi perusahaan.

Susunan dalam penelitian ini terdiri dari bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan penelitian, bab 2 tinjauan pustaka yang berisi teori dan penelitian terdahulu yang relevan serta perumusan hipotesis, bab 3 metode penelitian yang terdiri dari pemilihan data dan sampel, model pengujian dan definisi variabel, bab 4 berisi hasil pengujian dan bab 5 berisi kesimpulan dan saran.